



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RAMDAN DENNY PRAKOSO**
2. Jabatan : **KEPALA DEPARTEMEN**
3. NHK : **253641**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.870.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/223 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI , HIBAH DENGAN AKTA , Rp. 4.650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 21.95 m2/21.95 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 21.95 m2/21.95 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.109.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
2. MOTOR, YAMAHA BISON Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
6. MOBIL, WULING AIR EV LONG RANGE Tahun 2022, HASIL



SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.640.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 661.600.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. 415.000.000

Sub Total

Rp. 10.696.600.000

III. HUTANG

Rp. 844.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.852.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.